



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



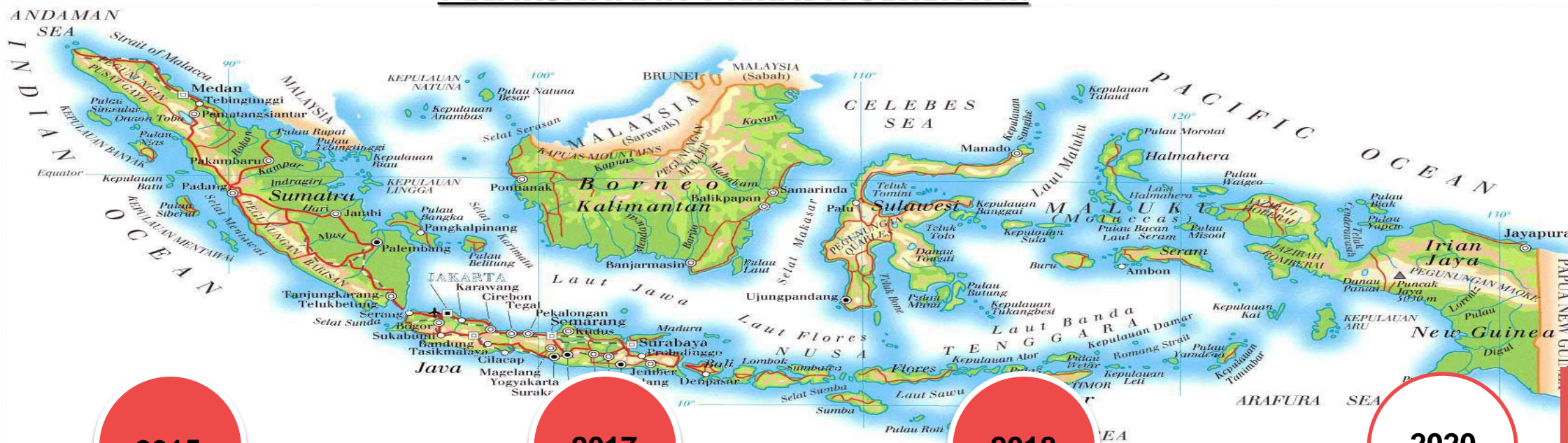
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 54 TAHUN 2019
TENTANG
PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI & WALI KOTA
YANG BERSUMBER DARI APBD



PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK



PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK



2015

2017

2018

2020

Pelaksanaan Pilkada Serentak
Tahun 2015 dilaksanakan oleh
269 Daerah;

Provinsi : 9
Kabupaten : 224
Kota : 36

Pelaksanaan Pilkada Serentak
Tahun 2017 dilaksanakan oleh
101 Daerah;

Provinsi : 7
Kabupaten : 76
Kota : 18

Pelaksanaan Pilkada Serentak
Tahun 2018 dilaksanakan oleh
171 Daerah;

Provinsi : 17
Kabupaten : 115
Kota : 39

Pelaksanaan Pilkada Serentak
Tahun 2020 dilaksanakan oleh
270 Daerah;

Provinsi : 9
Kabupaten : 224
Kota : 37



LATAR BELAKANG



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Surat Bawaslu Republik Indonesia
Nomor 0010/K.Bawaslu/HK.01.00/I/2019 tanggal 10 Januari 2019
Perihal Permohonan Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 44 Tahun 2015 dan Nomor 51 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Dana Pilkada.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Dilakukan
Pembahasan
Bersama



USULAN PERUBAHAN

01

Bahwa terdapat perubahan mendasar pada nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota yang semula bersifat ad-hoc diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat definitive (permanen);

02

Menegaskan bahwa dalam hal Panwas Kabupaten/Kota belum terbentuk, pengusulan kebutuhan pendanaan kegiatan dan pembahasan kegiatan pemilihan bersama TAPD diusulkan oleh Bawaslu Provinsi di hapus. Hal tersebut karena Bawaslu telah membentuk Bawaslu Kabupaten/Kota di 514 Kabupaten/Kota;

03

Dalam hal penyampaian laporan penggunaan belanja hibah kegiatan Pemilihan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih;

04

Dalam hal pengembalian sisa dana hibah, Penyelenggara Pemilihan wajib mengembalikan sisa dana hibah kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih;

05

Konsep atau Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) disusun dan dibahas bersama serta dijadikan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri sehingga menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun NPHD;

06

Pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai Kemampuan Keuangan Daerah;

07

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Aceh pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Peraturan Menteri ini, merujuk pada Pasal 557, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

08

Apabila ada perubahan anggaran dan rincian pada NPHD yang sudah ditandatangani, dapat melakukan Addendum.



PERMENDAGRI 54 TAHUN 2019



DASAR HUKUM

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 166 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari APBD.



UNDANG-UNDANG

1

UNDANG-UNDANG
NOMOR 39 TAHUN 2008

2

UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014



PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 11 TAHUN 2015

3

UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2016

4

UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017





PENDANAAN PILKADA



Dalam hal pendanaan tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran,
Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan.

Pasal 2

Tahapan Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan



Pasal 3



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PEMILIHAN KEPALA DAERAH



GUBERNUR

BUPATI

WALI KOTA

Pada 1 (satu) daerah antara
Provinsi/Kab/Kota

Dilakukan pendanaan kegiatan pemilihan
Bersama

dibebankan pada APBD masing-masing
Pemerintah Daerah secara proporsional
Sesuai dengan **beban kerja masing-masing daerah**



Dilaksanakan pada tanggal dan bulan
yang sama



Ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur



Disepakati bersama antara
Gubernur, Bupati, dan Walkot

Pasal 4

Pasal 6



Pasal 5

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH



GUBERNUR

BUPATI

WALI KOTA

terjadi

PEMUNGUTAN
SUARA ULANG

PEMILIHAN
LANJUTAN

PEMILIHAN
SUSULAN



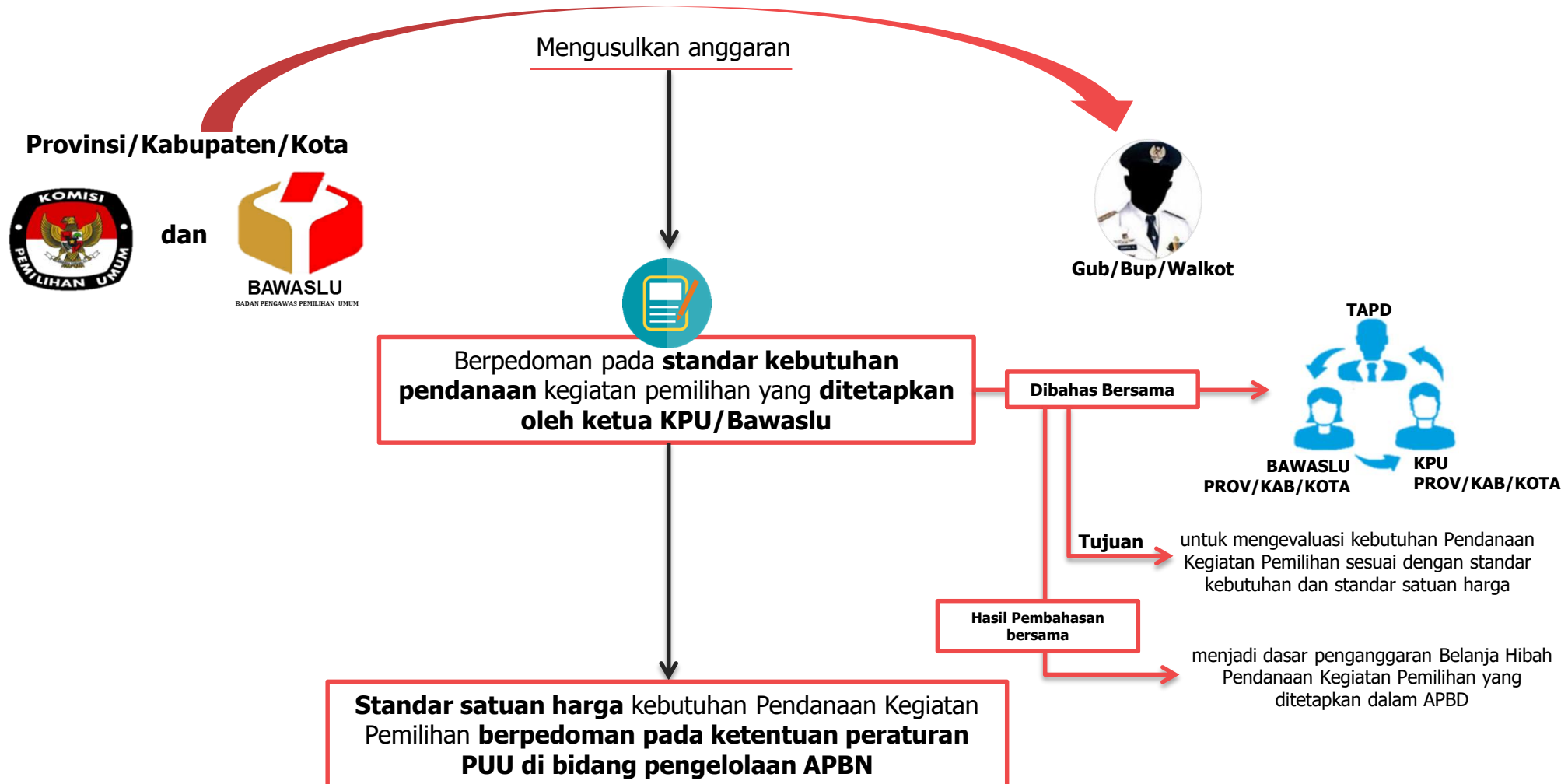
Pendanaannya dibebankan pada APBD Prov/Kab/Kota



PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN



PENGANGGARAN

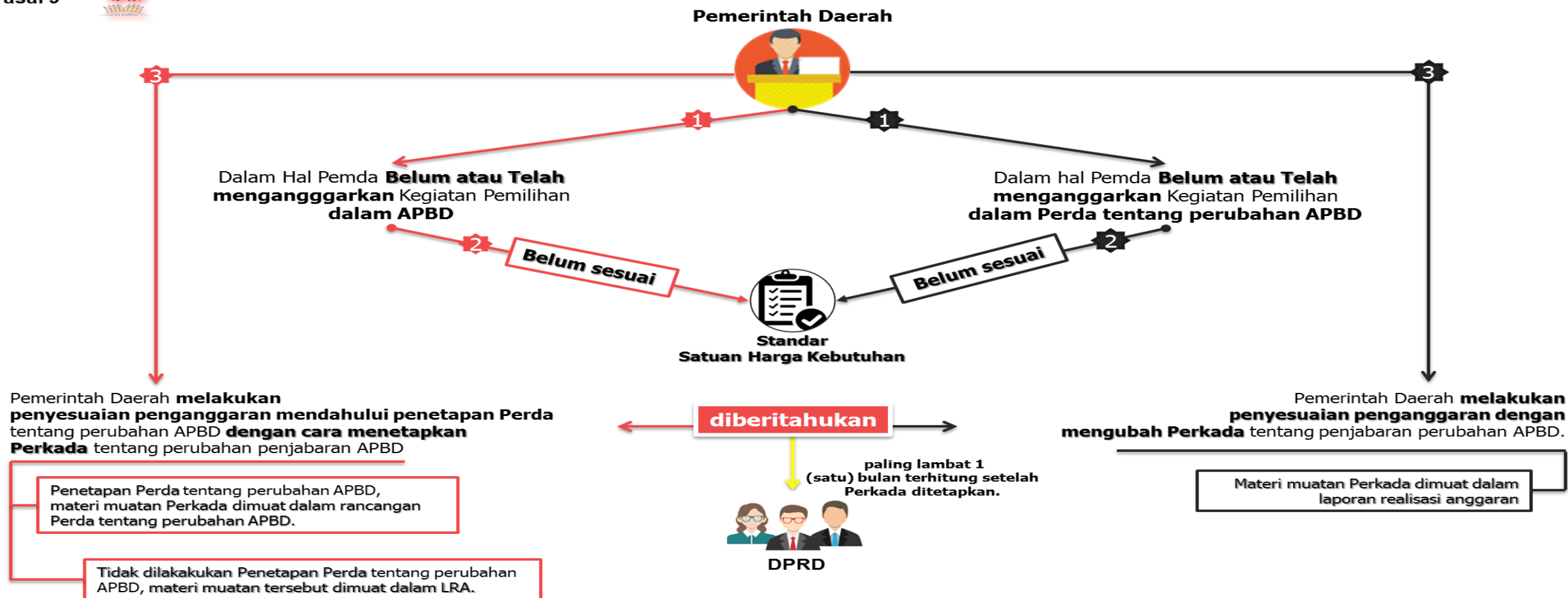




KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Pasal 9



Penyesuaian penganggaran kegiatan Pemilihan, dilakukan dengan Pergeseran Anggaran dari:

Pasal 10



Belanja Tidak Terduga



Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan



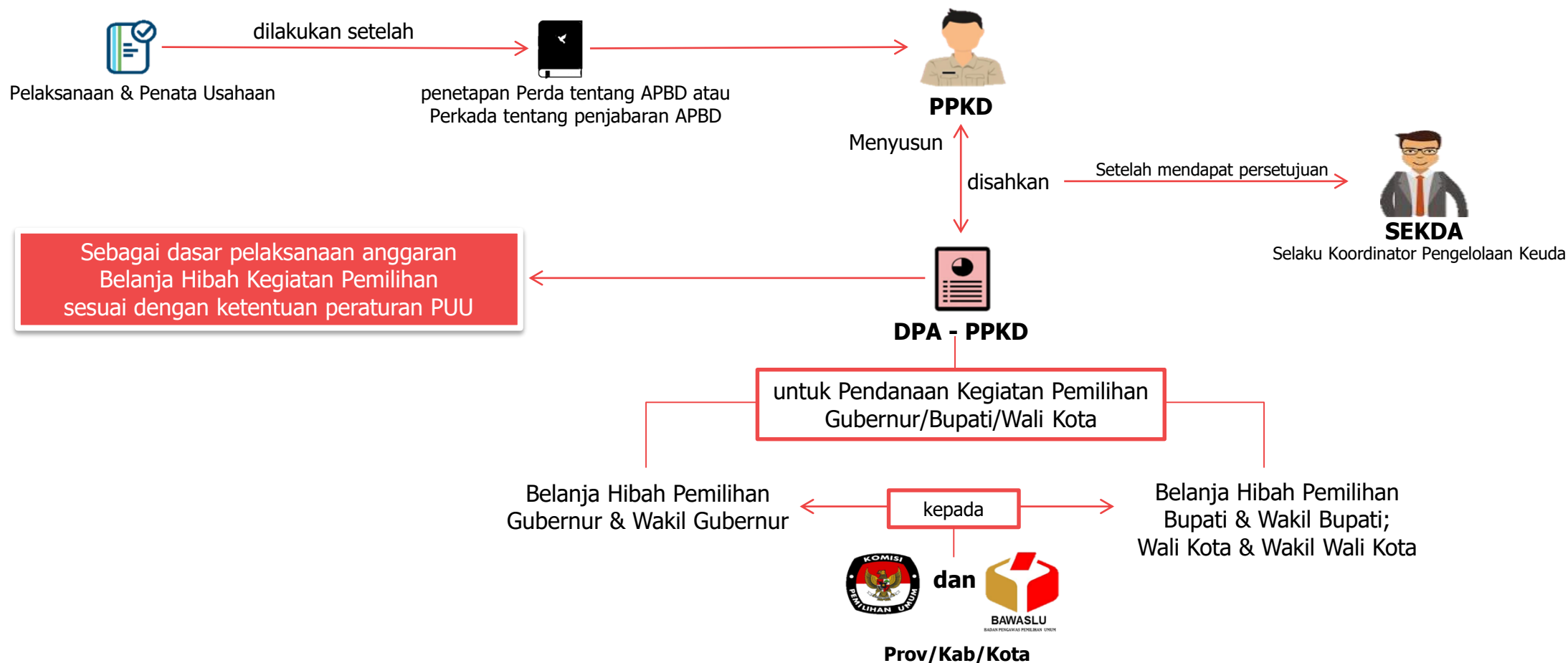
Memanfaatkan kas yang tersedia.



PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN

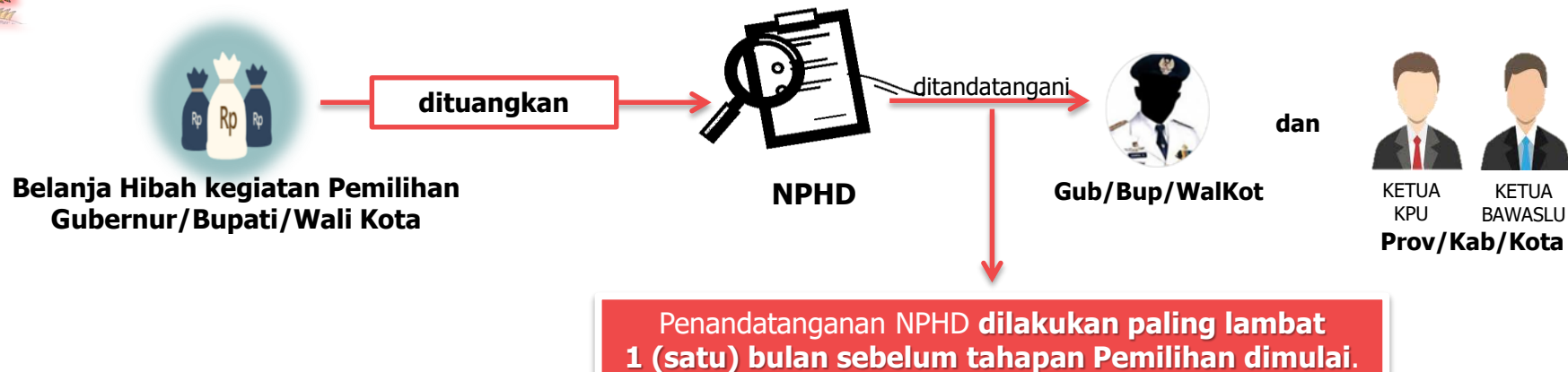


PELAKSANAAN & PENATA USAHAAN

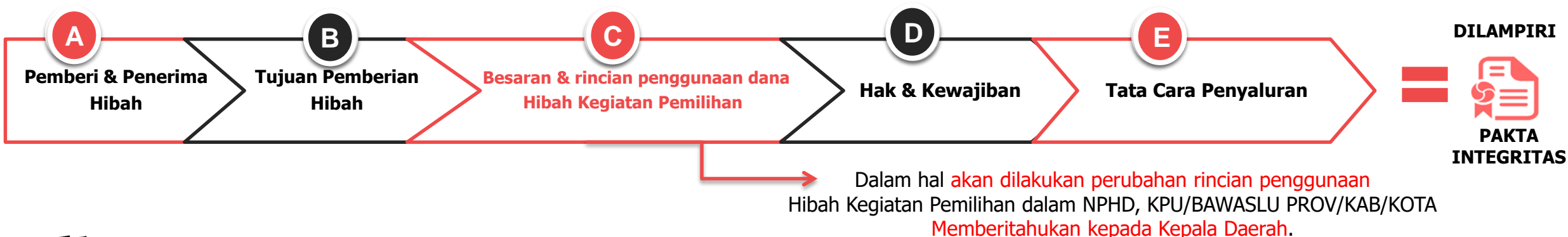




KEMENTERIAN DALAM NEGERI



NPHD memuat paling sedikit:



Perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan dimaksud dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah besaran Hibah kegiatan Pemilihan sesuai dengan NPHD yang telah ditetapkan.

FORMAT NPHD TERCANTUM DALAM PERMENDAGRI



menerbitkan



Dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan proses **Pencairan Belanja Hibah**



Prov/Kab/Kota



Prov/Kab/Kota

Mekanisme pembayaran langsung (LS)



Pencairan Belanja Hibah

Dapat Dilakukan:

- SECARA SEKALIGUS**

pencairan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD.

- SECARA BERTAHAP**

Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pencairan tersebut dilakukan dengan ketentuan:

1. Tahap 1 = Paling sedikit 40%

2. Tahap 2 = Paling sedikit 50%

3. Tahap 3 = Paling sedikit 10%

dilakukan tanpa menyampaikan laporan penggunaan terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.

50% dari nilai NPHD dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara.

40% dari nilai NPHD dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD.



10% (sepuluh persen) dan dicairkan paling lambat 1 (satu) bulan Sebelum Hari pemungutan suara.

Pencairan Belanja Hibah Secara Bertahap



Dalam Hal Setelah Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Terjadi:

Pasal 17



Perubahan Pasangan Calon

- Dalam hal **setelah penetapan pasangan calon terjadi perubahan jumlah pasangan calon** Pemilihan yang mengakibatkan pengurangan besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD dan **tahapan pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan secara bertahap tetap dilaksanakan.**
- Pengembalian kelebihan anggaran sebagai akibat dimaksud, diperhitungkan setelah semua tahapan Pemilihan selesai.





PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN

PELAPORAN

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH DIATUR DALAM PERMENDAGRI

II. LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH KEGIATAN
PEMILIHAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA

NO	URAIAN	JUMLAH			KETERANGAN
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	
	JUMLAH				

....., tanggal

Ketua

tanda tangan

(Nama Lengkap)


Pelaporan

dilakukan oleh



Prov/Kab/Kota

dan



Menyampaikan



Gub/Bup/WalKot

Penyampaian LPB Hibah

**paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih**





PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN



PERTANGGUNGJAWABAN

DILAKUKAN OLEH



dan



Prov/Kab/Kota



dan



Bertanggungjawab

secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh KPU/BAWASLU Provinsi dan/atau KPU/BAWASLU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembalian Sisa Dana Hibah

Sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan **masih terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan**, KPU/Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota **wajib mengembalikan sisa dana Hibah** Kegiatan Pemilihan **paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih** sesuai dengan ketentuan PUU.



PEMBINAAN & PENGAWASAN



Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan pembinaan



Gubernur

Terhadap pengelolaan dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Gubernur melakukan pembinaan kepada bupati/wali kota terhadap pengelolaan dana Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota.



Bupati/Walikota

Pembinaan dilakukan mulai **tahap perencanaan** dan **penganggaran sampai dengan tahap pencairan.**

Pengawasan atas penggunaan dana Hibah kegiatan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota **dilakukan oleh APIP**



KETENTUAN LAIN-LAIN

Pendanaan Kegiatan Pemilihan di Aceh diberikan kepada:

- Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan komisi independen pemilihan kabupaten/kota yang merupakan satu kesatuan kelembagaan hierarkis dengan KPU; dan
- Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota yang merupakan satu kesatuan kelembagaan hierarkis dengan Bawaslu.

Pendanaan Kegiatan Pemilihan di Aceh bersumber dari APBD.

- **Pendanaan Kegiatan Pemilihan pertama kali bagi daerah otonom baru** berpedoman pada peraturan PUU yang mengatur pembentukan daerah otonom baru yang bersangkutan.
- Pendanaan Kegiatan Pemilihan mengikuti tahapan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.





KEMENTERIAN DALAM NEGERI



TERIMA KASIH

